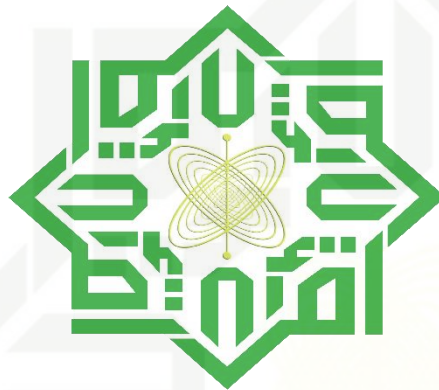




# PEMBATASAN BEKERJA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**AHMAD RIFAI RITONGA**

**NIM: 21790215639**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 1441/2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembar Pengesahan

Nama : Ahmad Rifai Ritonga  
Nomor Induk Mahasiswa : 21790215639  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami  
Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam.

Tim Penguji

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
Penguji I/ Ketua

**Dr. Tuti Anggraini, M.Pd**  
Penguji II/ Sekretaris

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
Penguji III

**Dr. Azni, M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 12 Mei 2020

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Penguji Tesis, Mengesahkan dan Menyetujui bahwa Tesis yang berjudul ***“Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam ”*** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Ahmad Rifai Ritonga  
NIM : 21790215639  
Program Studi : Hukum Keluarga (Al Ahwal Asy Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 12 Mei 2020.

Penguji I

**Dr. Sofia Hardani, M. Ag.**  
NIP. 196305301993032001

Tanggal, 22 Juni 2020

Penguji II

**Dr. Azni, M.Ag**  
NIP. 197010102007011051

Tanggal, 22 Juni 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis M.Ag.**  
NIP. 19670822 199803 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul “**Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Ahmad Rifai Ritonga**  
 NIM : 21790215639  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 01 April 2020  
 Pembimbing I,

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
 NIP. 197206282005012004

Tanggal: 05 Februari 2020  
 Pembimbing II,

**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
 NIP. 197512172001121003

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara Ahmad Rifai Ritonga

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: <b>Ahmad Rifai Ritonga</b>
NIM	: 21790215639
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 01 April 2020  
Pembimbing I

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
NIP.197206282005012004



**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Ahmad Rifai Ritonga

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Ahmad Rifai Ritonga
NIM	: 21790215639
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 05 Februari 2020  
Pembimbing II

  
**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 197512172001121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahmad Rifai Ritonga  
 NIM : 21790215639  
 Tempat/tanggal lahir : Rantauprapat, 09 September 1994  
 Program studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **"Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 April 2020



Ahmad Rifai Ritonga  
 21790215639

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat beriring semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas berkat *Rahmat* Allah yang Maha kuasa serta do'a dan dukungan dari semua pihak tesis ini selesai dengan baik, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Marahalim Ritonga dan Mama Samsinar Nasution yang telah memberikan dukungan dan do'a dengan penuh cinta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA selaku ketua program studi hukum keluarga S2, yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Erman Gani, M. Ag selaku pembimbing II dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan ibuk dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Seluruh keluarga dan kawan-kawan penulis yang memberikan bantuan moril dan materil, semoga Allah melipat gandakan pahala kita semua.

Hanya kepada Allah SWT penulis berdo'a dan memohon semoga segala kebaikan dan jerih payah yang diberikan mendapatkan pahala, semoga tesis ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan.

Penelis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Pekanbaru, 22 April 2020



**AHMAD RIFAI RITONGA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Defenisi Istilah.....	7
C. Permasalahan .....	15
1. Identifikasi Masalah .....	15
2. Pembatasan Masalah .....	16
3. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
E. Kajian Relevan.....	18
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisa Data.....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KETENTUAN PERKAWINAN DAN HUBUNGAN SUAMI</b>	
<b>ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	25
B. Tujuan Perkawinan .....	28
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	35
D. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Islam .....	39
E. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan .....	48
1. Hak-Hak Istri.....	50
2. Hak-Hak Suami.....	73
3. Hak-Hak Bersama Pasangan Suami Istri .....	84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TEORI KDRT DAN PEREMPUAN BEKERJA .....</b>	<b>85</b>
A. KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	85
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	85
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	88
3. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	94
B. Ketentuan Perempuan Bekerja Menurut Hukum Islam.....	111
1. Pengertian Perempuan Bekerja .....	111
2. Hukum Perempuan Bekerja Dalam Islam.....	113
<b>BAB IV PEMBATAAN BEKERJA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>122</b>
A. Ketentuan Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	122
1. Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri .....	122
2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	124
B. Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam.....	131
1. Penelantaran Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam ..	131
2. Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri .....	136
3. Alasan dan Tujuan Perempuan Bekerja .....	137
4. Hukum Membatasi/Melarang Bekerja .....	141
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	



### DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	Swt.,	Subahanahu wa Ta'ala
2	Saw.,	Shallallahu 'Alaihi Wasallam
3	As.,	'Alaihissalam
4	Q.S	Al-Qur'an Surat
5	h	Halaman
6	t.pn	Tanpa Penerbit
7	t.tp	Tanpa Tempat Penerbit
8	t.t	Tanpa Tahun Penerbit
9	w.	Wafat
10	H.R	Hadits Riwayat
11	r.a	Rhadiya Allah 'anhu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	,
ش	Sh	ي	Y



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	ض	DI		
----------------------------------	---	----	--	--

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal panjang =	(a)	Â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal panjang =	(i)	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal panjang =	(u)	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw udanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Teks pasal 9 menyatakan bahwa *“penelantaran dalam rumah adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1). Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9 ayat 2)”*. Karena itu, pokok masalah pada penelitian ini adalah apakah membatasi pasangan bekerja termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga/KDRT lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode *conten analisis* atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian adalah bahwa pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 merupakan perbuatan KDRT. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, menelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. *Kedua*, membatasi pasangan bekerja bukanlah termasuk dari bagian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) jika suami mencukupkan nafkah istri. *Ketiga*, istri boleh bekerja dengan syarat: suami setuju, pekerjaannya sesuai dengan aturan Islam dan halal, terhindar dari *fitnah* dan *khalwat*. *Keempat*, suami tidak boleh membatasi dan melarang istri bekerja bila telah ada perjanjian sebelum akad nikah berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama kontemporer dengan syarat nya yang sesuai dengan *syari'at* dan halal.





## ملخص

هذا البحث عنوانه " تقييد العمل للأزواج في المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 من منظور الشريعة الإسلامية "

خلفية هذا البحث هي المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 عن إزالة العنف المنزلي. فالمادة تتضمن العنف الاقتصادي أو الإهمال في الأسرة، وتنص على أن الإهمال في الأسرة أي من يهمل شخصا يكون في نطاق أسرته، وحيث أنه وفقا للقانون الساري بالنسبة له أو بسبب اتفاق فإنه ملزم بتوفير الحياة أو الرعاية لهذا الشخص (المادة 9 الفقرة 1). بالإضافة إلى ذلك، ينطبق الإهمال أيضا على أي شخص يسبب التبعية الاقتصادية عن طريق تقييد أو حظر العمل اللائق داخل المنزل أو خارجه بحيث تكون الضحية تحت سيطرته (الفقرة 2 من المادة 9).

هذا البحث هو بحث معياري بنهج قانوني يطبق في القانون رقم 23 لسنة 2004 عن إزالة العنف المنزلي. ومصادر البيانات هي مصادر ثانوية تم الحصول عليها من مصادر القانون الأساسية، مصادر القانون الثانوية ومصادر القانون الجامعية. وتقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي البحث عن الأدبيات المتعلقة بالموضوع، ثم تسجيلها كعملية تصنيع، ثم تحليلها حسب الحاجة. وتقنية تحليلها هي طريقة تحليل المضمون بتقنية استنتاجية واستقرائية.

نتائج هذا البحث هي أن تقييد العمل للأزواج في المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 يشكل عنفا منزليا. وأما مراجعة القانون الإسلامي لتقييد العمل للأزواج في المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 على النحو التالي. أولا، إن ترك الزوجة بعدم توفير لقمة العيش عمل محظور في الإسلام. ثانيا، تقييد العمل الذي يقوم به الزوج على زوجته ليس عنفا منزليا. ثالثا، يمكن للزوجة العمل بشرط: موافقة الزوج، وأن يكون العمل وفقا للشريعة الإسلامية وحلالا وسالما من الفتن والخلوة. رابعا: يجب على الزوج ألا يقيد أو يمنع زوجته من العمل إذا كان هناك اتفاق قبل عقد النكاح، وهو رأي الإمام أحمد وبعض العلماء المعاصرين بشرط أن يكون العمل وفقا للشريعة الإسلامية وحلالا.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**This thesis is entitled: The Limitation of Work for Husband and Wife in the article 9 of law number 23 of 2004 Viewed in the Perspectives of Islamic Law**

This study was conducted with reference to the article 9 of law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The article contains economic abuse or neglect in the household, which is stated that "neglect in the household (economic abuse) is one who neglects people within the scope of his household, whereas according to the law, due to the agreement he is obliged to provide life and care for those people (article 9 paragraph 1). In addition, neglect is also applied to everyone who causes economic dependence by limiting and or prohibiting decent work inside or outside the home so that the victim is under the person's control (article 9, paragraph 2)".

This study employed a normative research in terms of a law approach which is applied in Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The sources in this study were the secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literatures related to the subject matter, then recorded as the manufacturing process, and analyzed as needed. The technique used in this study was the content analysis method or content analysis with inductive and deductive techniques.

The results shows that the limitations of work for married couples in article 9 of law number 23 of 2004 is a domestic violence. With reference to Islamic law on the limitation of work in article 9 of law number 23 of 2004, it can be concluded as follows. First, abandoning his wife by not providing a living is an act which is forbidden in Islam. Second, the limitation of work done by a husband to his wife is not domestic violence. Third, the wife can work on the condition: the husband agrees, the work that she does is in accordance with Islamic rules and lawful, avoiding slander and seclusion. Fourth, the husband must not limit or forbid his wife to work if there is an agreement before the marriage contract, this is the opinion of Imam Ahmad and some contemporary Islamic scholars that wife can work if it is in accordance with *shari'ah* and lawful.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Memperoleh *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah tujuan pokok dan utama dalam perkawinan.<sup>1</sup> Adapun tujuan mendapatkan *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* ini disebutkan dalam surah al-Rum [30]:21 berikut ini,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

*سكينة* berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman. Maka penyebutan *سكين* untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.<sup>3</sup>

Keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, ia terdiri dari istri yang patuh dan

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:Academia+Tazaffa, 2013), h. 43

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Banten:Forum Pelayan Al-Quran, 2018), h. 406

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung:Mizan, 1996), h. 192

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Model keluarga yang seperti ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui dan menkalankan hak dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban dalam perkawinan merupakan akibat hukum dari akad nikah bagi pasangan suami istri.<sup>5</sup> Hak adalah apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak istri dalam perkawinan merupakan sekumpulan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami, begitu sebaliknya, hak suami merupakan serangkaian kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh istri.<sup>6</sup>

Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya istri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga ketika istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dapat dilihat dalam al-Quran surah al-Baqarah [2]:228 berikut ini,

---

<sup>4</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 134

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 155

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159



..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan ayat di atas laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Suami memiliki hak dan kewajiban kepada istrinya sebaliknya istri juga begitu.<sup>7</sup> Dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami istri adalah adat ('urf) dan nature (fitrah), dasarnya ialah setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>8</sup>

Kewajiban suami kepada istri terbagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang berbentuk materi (maaliyah) dan kewajiban yang bersifat non materi (ghairu maaliyah). Kewajiban yang berbentuk materi adalah memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Kewajiban yang berbentuk non materi adalah mempergauli istri dengan baik, menjaga ucapan dan perbuatan dari merusak atau menyakiti perasaan istri.<sup>9</sup>

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada hanyalah kewajiban berbentuk non materi. Kewajiban yang berbentuk non materi itu adalah menggauli secara layak sesuai dengan

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1418 H), Cet. Ke-2, Juz 2, h. 321

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 58

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, taat dan patuh kepada suami selama tidak melanggar syariat.<sup>10</sup> Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]:34.<sup>11</sup> Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangannya tidak meyalahi ketentuan agama.<sup>12</sup>

Salah satu kewajiban suami yang sangat penting dan harus diemban oleh setiap suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami kepada istrinya, ini apabila diberikan dengan lapang dada tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>13</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberian nafkah di dalam lingkup rumah tangga, tidak memberi nafkah kepada keluarga ringkasnya dianggap telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.*, h. 84

<sup>12</sup> Wizaratu al-Auqaf wa al-Syuuni al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiah*, (Kuwait: Thaba'ah al-Wizarat, 1427 H), Jilid 41, h. 313

<sup>13</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 undang-undang no 23 tahun 1974 tentang perkawinan).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>

Orang yang berada dalam lingkup rumah tangga terdiri dari suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).<sup>16</sup> Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).<sup>17</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).<sup>18</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*



untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>19</sup> Penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi) adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1). Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9 ayat 2).<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dirumuskan bahwa aturan memberikan nafkah kepada istri dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terlihat menjiwai konsep nafkah dalam Islam. Namun permasalahannya ada di ayat 2 yaitu “penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Bagaimana kaitan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah suami yang memberikan kecukupan nafkah kepada istri

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuannya lalu membatasi istrinya bekerja keluar rumah dianggap penelantaran dalam rumah tangga alias KDRT. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa ada pasal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penulis merasa tergugah untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul “PEMBATASAN BEKERJA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

#### B. Defenisi Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulis memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul.

##### 1. Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri

Kalimat “pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri” terdiri dari beberapa kata. Yaitu, kata “pembatasan”, “bekerja”, “bagi”, “pasangan”, “suami” dan “istri. Pembatasan berasal dari kata “batas” berarti garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya) atau pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya) atau sempadan atau dalam bahasa lain dapat dikatakan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.<sup>21</sup> Pembatasan diberikan imbuhan prefiks “pe” dan sufiks an. Awalan

<sup>21</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas>, terakhir diakses 27 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pe menjadi pem sebab kata dasar batas diawali huruf “b” maka jadilah pembatasan.<sup>22</sup> Makna pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.<sup>23</sup>

Asal kata bekerja adalah “kerja” yang berarti sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian atau dengan kata lain dapat juga dikatakan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Dengan tambahan awalan “be” bekerja menjadi kata kerja maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan.<sup>24</sup>

Kata “bagi” merupakan kata depan untuk menyatakan tujuan; untuk.<sup>25</sup> Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki perempuan atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, dan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri dalam penelitian ini adalah perbuatan membatasi gerak gerak pasangan dalam hal bekerja secara profesional di luar rumah atau sektor publik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya.

<sup>22</sup> [https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa\\_Indonesia/Prefiks](https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Prefiks), terakhir diakses 27 Januari 2020.

<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatasan>, terakhir diakses 27 Januari 2020.

<sup>24</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bekerja>, terakhir diakses 27 Januari 2020.

<sup>25</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bagi>, terakhir diakses 27 Januari 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah undang-undang yang disahkan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 september 2004 yang dimuat dalam 10 bab dan 56 pasal.<sup>26</sup> Hal-hal penting yang dalam undang-undang ini adalah:

- a. Adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindak pidana.
- b. KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
- c. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan majikan (orang yang memperkerjakan dan keluarganya).
- d. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik (dimana orang lain tidak berhak ikut campur) tetapi telah dianggap sebagai masalah publik (orang lain berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat diakui secara hukum), kecuali untuk kekerasan seksual suami istri kekerasan, fisik dan psikis yang termasuk dalam kategori berakibat ringan.

---

<sup>26</sup> Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adanya hukuman minimal yang diterapkan dalam kekerasan seksual.
- f. Adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Relawan pendamping dan penasihat hukum korban diperbolehkan untuk mendampingi korban disetiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan).
- h. Adanya kemungkinan pidana tambahan diluar penjara atau denda berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.
- i. Keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
- j. Keterangan seorang saksi korban berupa surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- k. Adanya pelayanan kesehatan bagi korban.
- l. Adanya kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, kecuali ada alasan yang patut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Adanya kemungkinan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penahanan tanpa surat perintah, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

### 3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama juga tidak diemukan makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, ia juga berarti yang sebenarnya adalah jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Kajian wacana hukum di kalangan ahli hukum barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.<sup>27</sup>

Tidak ditemukan fakta siapakah yang lebih dulu memakai istilah hukum Islam, yang jelas para ahli menisbatkan hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *syariat* atau *hukm al-syar'iy*. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata hukum dengan, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan kaidah, ketentuan mengenai peristiwa tertentu dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Secara sederhana hukum

<sup>27</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>28</sup> Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.<sup>29</sup>

Hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum positif) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>30</sup> Pengertian sederhananya, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gabungan dua kata hukum dan Islam muncul istilah

<sup>28</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012) h.

38

<sup>29</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-arab terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif 2007), h. 286

<sup>30</sup> Mahmud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang) , Cet ke II, h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam, dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Kata *syari'at* terdapat dalam ayat sebagai berikut,<sup>29</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.*<sup>31</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini, pertama bahwa al-Qur'an adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, kitab yang menyempurnakan dari semua kitab yang sudah Allah SWT turunkan kepada para nabinya, para ulama seperti Sufyan al-Tsauri,

<sup>31</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.*, h. 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan makna ayat ini adalah salah satunya al-Qur'an sebagai saksi untuk kitab-kitab yang terdahulu dan al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna.<sup>32</sup> Selanjutnya dalam ayat “untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan jalan yang terang”, al-‘Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menjelaskan maknanya adalah *شرعة* dan *ومنها جا* yaitu *syari'at* dan *manhaj*. Makna *syari'at* adalah sesuatu yang menjadi pemulaan dalam menuju sesuatu, *manhaj* berarti jalan yang jelas lagi mudah.<sup>33</sup>

Secara substansial, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan, *syariat* secara istilah berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Abu Hanifah mendefinisikan *syari'at* adalah yaitu *din*, meliputi semua yang di ajakan Rasulullah SAW memuat semua aspek kehidupan.<sup>34</sup> Firman Allah SWT dalam al-Qur'an mengenai kesempurnaan aturan-aturan yang Allah SWT turunkan terdapat dalam surah al-Maidah [5]:3 berikut,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا

<sup>32</sup> Ibnu Katsiir, *Lubabut Tafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahasa, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan al-Atsari, Bogor, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 3, h.100

<sup>33</sup> Alaidin Koto, *Op.cit.*, h.25

<sup>34</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>35</sup>

Ayat ini turun pada Haji Wada’ hari ‘arafah ayat ini merupakan wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Setelah membaca dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi) pada pasal 9 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 9 ayat 2 secara tersirat mengandung arti bahwa suami melarang dan membatasi istri bekerja di luar rumah dianggap melakukan kekerasan ekonomi.

<sup>35</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.*, h. 107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pasal tersebut juga mendorong suami untuk memberikan keleluasaan kepada istri untuk mandiri secara ekonomi.
- d. Mendorong istri untuk tidak mematuhi suami karena merasa berada di bawah kendali.
- e. Kedudukan suami dalam undang-undang dan hukum Islam.
- f. Asas dan tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004. Pada pasal tersebut pasangan suami istri dapat dijadikan objek pembatasan bekerja, namun pada penelitian ini hanya akan membahas suami yang melakukan pembatasan bekerja kepada istrinya, alasannya adalah karena kasus suami melarang istrinya bekerja sangat banyak dan sering terjadi sedangkan kasus istri melarang suaminya bekerja jarang terjadi.

### 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

- a. Bagaimana pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri dalam pasal tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Mengupas lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui lebih jauh pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 menurut perspektif hukum Islam.
- b. Memberikan sikap partisipasi dalam dunia ilmiah sekaligus kontribusi pemikiran penulis kepada masyarakat dalam kajian terhadap undang-undang.
- c. Memperkaya khazanah ilmiah dan wawasan penulis terhadap hukum keluarga Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Syarat untuk meraih gelar magister hukum pada program pascasarjana prodi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

## E. Kajian Relevan

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya telah dibahas diantaranya:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Mawardi yang berjudul *"Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"*. Tulisan tersebut menjelaskan tentang bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri seperti: (1) Sadisme seksual yang merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami istri. Perilaku sadisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistik. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. (2) Menyetubuhi pada dubur istri karena dapat dipersamakan dengan liwath (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Analisis hukum Islam terhadap penyimpangan seksual (sadisme seksual) juga mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Unsur penganiayaan dan bahaya ini dilarang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Islam, karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak sesuai dengan tujuan agama Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta yang menghendaki agar segenap manusia hidup dalam keadaan tenteram dan sekaligus menghilangkan adanya bahaya bagi umat manusia. Sedangkan dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan aniaya (kemafsadatan). Penyimpangan seksual suami terhadap istri menurut pasal 8 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah termasuk tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai istri.

Perbedaan dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari bahwa penelitian sebelumnya memfokuskan pada pembahasan bentuk kekerasan seksual sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran dalam rumah tangga.

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Miftahul Mukhtarom, UIN SUSKA Riau Tahun 2016 dengan judul "*Nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya dengan UU No 23 tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*". Tulisan ini menjelaskan tentang konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam lalu kemudian dicari relevansinya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Nur Rofiah Tahun 2017 yang berjudul *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam"*. Penulisnya memaparkan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam yang kemudian disimpulkan bahwa KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, strategi yang paling ampuh untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga yang sakinah dalam perspektif kesetaraan.

Berdasarkan judul-judul yang telah penulis uraikan di atas belum ada penelitian yang membahas secara mendalam tentang “Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam”.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004, teori hukum keluarga Islam, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, perempuan bekerja dan kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>36</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), cet. Ke-1, h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang teraplikasi dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai pasal 9 ayat 2 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Setelah itu dihubungkan dengan hak dan kewajiban, konsep keluarga dalam Islam serta perempuan bekerja menurut hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>37</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa: buku Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hadijah dan Laa Jama), *Al Jami' Fi Fiqhi Al Nisa'* (Kamil Muhammad Uwaidah), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Al Zuhaili), *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq) serta kitab-kitab fiqih yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus hukum dan fiqh serta ensiklopedia hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

#### 5. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *conten analisis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>38</sup> Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan teknik:

- a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

<sup>38</sup> Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),



## G. Sistematika Penulisan

**BAB I** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan (identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, kajian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Ketentuan perkawinan dan hubungan suami istri perspektif hukum Islam yang mencakup: pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam perkawinan

**BAB III** Teori Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perempuan Bekerja.

**BAB IV** Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri berisi: pembatasan bekerja pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004, pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam.

**BAB V** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KETENTUAN PERKAWINAN DAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Dari kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah kata زوج berarti 'pasangan' dan istilah نكح berarti 'berhimpun', dengan demikian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زوج terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an, sementara نكح dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.<sup>39</sup>

Istilah زوج dan نكح yang digunakan untuk perkawinan (pernikahan) tersebut jika disandingkan akan mengandung arti bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambaha, kata زوج meberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.<sup>40</sup>

Adapun dari sisi istilah perkawinan didefenisikan oleh para ulama, diantaranya:

<sup>39</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZAFFA, 2013), h. 20

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung:Mizan, 1996), h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.<sup>41</sup>

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.<sup>42</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>43</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong

<sup>41</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), h. 18

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329

<sup>43</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.<sup>44</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (istimta') dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.<sup>45</sup> Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tajwiz atau semakna dengan keduanya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.<sup>47</sup>

Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau tajwiz atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.

<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), h. 8

<sup>46</sup> Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 17

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.18



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Yang dimaksud dengan tujuan perkawinan pada bagian ini adalah manfaat atau hikmah atau sasaran yang dituju dalam perkawinan. Penetapan tujuan ini terdapat dalam sejumlah nash al-Qur'an dan sunnah yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yakni al-Baqarah [2]:187 dan 223, al-Nisa' [4]:1,9 dan 24, al-Nahl [16]:172, al-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu'minin [23]:5-7, al-Nur [24]:33, al-Rum [30]:21, al-Syura' [42]:11, al-Ma'arij [70]:29-31 dan al-Thariq [86]:6-7.<sup>48</sup>

Dari sejumlah nash tersebut akan terlihat 5 tujuan umum perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Adapun tujuan ini disebutkan dalam surah al-Rum [30]:21 berikut,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*<sup>49</sup>

#### 2. Reproduksi/Regenerasi

Tujuan kedua adalah mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, dapat dilihat pada surah al-Syura [42]:11,

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهَا لَيَسَ كَمَثَلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang*

<sup>48</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.cit.*, h. 42

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Banten:Forum Pelayan Al-Quran, 2018), h. 406

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”<sup>50</sup>

Kedua, dalam al-Nahl [16]:72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>51</sup>

Ketiga, dalam al-Nisa’ [4]:1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>52</sup>

Pada ayat pertama, al-Syura [42]:1 untuk menunjukkan perkembangbiakan binatang ternak, ayat kedua al-Rum [30]:21 menunjukkan regenerasi manusia. Ketika menyebut perkembangbiakan manusia disebutkan kalimat *mawaddah wa rahmah* namun tidak disebutkan ketika berbicara tentang binatang.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibid, h. 484

<sup>51</sup> Ibid, h. 274

<sup>52</sup> Ibid, h. 77

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 213-214

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang saleh. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman dan umat yang banyak tersebut akan menyiarkan/menegakkan ajaran Islam.

### 3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Perkawinan juga bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis manusia baik laki-laki maupun perempuan. Dapat dilihat dalam surah al-Baqarah [2]:187,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”<sup>54</sup>*

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, al-Baqarah [2]:223,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّؤَفَّوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

Ketiga, al-Nur [24]:33,

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَنِيتُكُمْ عَلَىٰ الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِينًا لِّنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>55</sup>*

Keempat, al-Ma’arij [70]:29-31,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حُفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka*

<sup>55</sup> Ibid, h. 354

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.<sup>56</sup>

Kelima, al-Mu’minun [23]:5-7,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حُفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُؤْمِنِينَ فَمَنْ أَتَّبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”<sup>57</sup>

Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis secara langsung dapat dilihat pada nash ayat pertama al-Baqarah [2]:187 dan ayat kedua al-Baqarah [2]:223. Sementara ayat yang ketiga, al-Nur [24]:33 menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan orang yang membutuhkan nikah tetapi tidak atau belum mampu. Adapun ayat yang keempat dan kelima, al-Ma’arij [70]:29-31 dan al-Mu’minun [23]:5-7 lebih menekankan pada usaha menjaga kemaluan/kehormatan.

#### 4. Menjaga Kehormatan

Tujuan keempat dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat dalam surah al-Ma’arij [70]:29-31 dan al-Mu’minun [23]:5-7 yang telah ditulis

<sup>56</sup> Ibid, h. 569

<sup>57</sup> Ibid, h. 435

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Selain itu, juga terdapat dalam al-Nisa' [4]:24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>58</sup>

Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan biologi. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi, laki-laki atau perempuan bisa saja mencari pasangan lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologi. Tetapi dengan melakukan itu, dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologinya terpenuhi, demikian juga kehormatan terjaga.

<sup>58</sup> Ibid, h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Ibadah

Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah adalah tujuan perkawinan, tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Di antara teks nash tersebut adalah sunnah Nabi yang menyatakan:

وَمَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الْبَاقِي

“....seseorang yang telah menikah dia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah atas setengah lagi yang tersisa.

Nash hadits di atas sangat tegas menyebut bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari ibadah dan perintah agama.

## C. Prinsip–Prinsip Perkawinan

Maksud prinsip dalam tulisan ini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum/dasar yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga. Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan sunnah setidaknya ada 6 prinsip yang harus diamalkan dalam perkawinan. Enam prinsip ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Musyawarah dan Demokrasi

Prinsip pertama, adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam rumah tangga. Artinya, segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri.<sup>59</sup> Lebih dari itu, kalau dibutuhkan juga

<sup>59</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.cit.*, h. 62-63



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri dan anak/anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan, menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga dalam berbagi suka dan duka serta merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya.<sup>60</sup> Prinsip musyawarah dalam hubungan keluarga ini ditunjukkan oleh firman Allah berikut,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهَا أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

#### 2. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram dalam Keluarga

Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga merupakan prinsip perkawinan yang berarti bahwa terciptanya

<sup>60</sup> Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, h. 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling menyayangi, melindungi, dan saling sayang.<sup>61</sup> Adapun rasa aman yang dimaksud adalah aman dan tentram dalam kehidupan lahir dan bathin, bersifat rohani maupun materi. Prinsip ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah al-Rum [30]:21.

### 3. Menghindari Adanya Kekerasan

Pada prinsipnya, perkawinan terhindari dari adanya kekerasan (*violence*) baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berkah memukul atau melakukan tindakan kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun baik kepada atau antar pasangan maupun pasangan dengan anak-anak.<sup>62</sup> Prinsip ini sesuai dengan isi kandungan al-Qur'an surah al-Nisa' [4]:19 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu*

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 69-70

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*<sup>63</sup>

#### 4. Hubungan Suami Istri Sebagai Hubungan Patner

Pada prinsipnya, hubungan suami istri bukan hubungan atasan dan bawahan, juga bukan hubungan kepemilikan (budak) tetapi hubungan suami istri adalah hubungan kemitraan antara suami dan istri. Pasangan suami dan istri adalah patner sejati dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Prinsip ini diisyaratkan dalam al-Quran surah al-Baqarah [2]:187 berikut,

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .....

.....”mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. .....<sup>64</sup>

Ayat kedua dalam surah al-Baqarah [2]: 228,

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....

.....”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”. .....<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam surah al-Nisa' [4]:32 juga mengisyaratkan hubungan kemitraan dan kesejajaran antara suami dan istri,

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 80

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اُكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اُكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>66</sup>

Ketiga ayat tersebut di atas memberikan isyarat bahwa suami dan istri harus bermitra dan sejajar, tujuan perkawinan akan mulus dan sukses kalau pasangan suami dan sitri bermitra dan memposisikan sebagai pasangan sejajar.

#### D. Pola Hubungan Suami Istri Dalam Islam

Hubungan suami istri adalah hubungan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi transaksi-transaksi lain.<sup>67</sup> Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا). Al-Qur'an menyebutkan sebagai berikut,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-*

<sup>66</sup> Ibid., h. 83

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZAFFA, 2013), h. 27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>68</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang ketidak bolehan mengambil mahar diberikan, padahal telah saling bergaul sebagai suami istri, dan telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang baik. Kata *مِيثَاقًا غَلِيظًا* bermakna perjanjian yang teguh dan sah, merupakan pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.<sup>69</sup>

Pola hubungan suami istri diatur dalam beberapa surat dalam al-Qur'an antara lain: surat al-A'raf [7]: 189 berikut ini,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صُلْحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".”<sup>70</sup>*

Ayat di atas menggambarkan bahwa pasangan suami istri sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang

<sup>68</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan al-Qur'an, 2018), h. 81

<sup>69</sup> Abu Ja'far al-Thabary, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Quran*, (Muassasah al-Risalah, 1420 H), Jilid 8, h. 127

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 175

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu) yaitu Adam AS.<sup>71</sup> Penggunaan istilah *nafsin wahidah* menunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului dengan reunifikasi pada tingkat hakikat, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari yang satu,<sup>72</sup> sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an surat al-Nisa' [4]:1 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*<sup>73</sup>

Pada ayat yang lain, al-Qur'an surat al-Rum [30]:21 Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

<sup>71</sup> Abu Ja'far al-Thabary, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Quran*, (Muassasah al-Risalah, 1420 H), Jilid 13, h. 303

<sup>72</sup> Jumni Nelli, *Kontruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja: Studi Kasus Istri yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, (Disertasi Doktor: UIN Suska Riau), h. 100

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, h. 77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>74</sup>

Ayat di atas mengatakan bahwa Allah telah menciptakan untukmu istri - istri dari diri kamu. Maksudnya adalah pasangan kita sesungguhnya adalah diri kita. Hal ini bertujuan untuk mencapai atau mendapatkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (ketentraman, cinta dan kasih sayang).<sup>75</sup> Merugikan pasangan berarti merugikan diri sendiri. Menyakiti pasangan berarti menyakiti diri sendiri. Sebaliknya membahagiakan pasangan berarti membahagiakan diri sendiri, karena pasangan kita sesungguhnya adalah diri kita. Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik, sebagaimana firman Allah surat al-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut.....”<sup>76</sup>

Ayat di atas mengatakan bahwa hubungan suami istri didasarkan pada *mu’asyarah bil ma’ruf* (pergaulan suami-istri yang baik) menurut ahli tafsir bahwa istilah *ma’ruf* dalam arti perintah untuk berbuat baik terhadap istri yang dicintai maupun tidak, secara bahasa *ma’ruf* dipahami tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lebih dari itu yakni berbuat *ihsan*.<sup>77</sup> Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]:228 yang berbunyi,

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 406

<sup>75</sup> Abu Ja’far al-Thabary, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Quran*, (Muassasah al-Risalah, 1420 H), Jilid 20, h. 86

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>77</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Jilid I, h. 454

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>78</sup>

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah SWT. menghendaki perkawinan dan hubungan suami-istri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa *muasyarah bil ma'ruf, sakinah, mawaddah wa rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijalankan dan dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami-istri.

Hubungan suami-istri adalah hubungan yang sangat dekat, kedekatan suami-istri diungkapkan juga dengan beberapa istilah dan perumpamaan di dalam al-Qur'an. Antara lain dapat kita lihat di dalam surah al-Baqarah [2]:187 yang berbunyi,

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

*“.....Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.*<sup>79</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa pasangan suami-istri bagaikan badan dan pakaian. Saling melengkapi dan membutuhkan. Betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya,

<sup>78</sup> *Op.cit.*, h. 36

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri juga begitu sehingga mereka harus berusaha untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain, tidak hanya itu, ayat ini juga memerintahkan suami-istri yang masing-masing punya kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian penutup aurat (kekurangan pemakainya).<sup>80</sup> Al-Qur'an membuat kiasan yang sangat indah tentang suami istri dengan istilah pakaian, Jumni Nelli mengatakan ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada pasangan suami istri, antara lain:

1. Pakaian sebagai penghangat, suami istri yang baik hendaknya berfungsi sebagai penghangat dan pendingin bagi pasangannya dalam kehidupan berumah tangga, ada kalanya datang saat dingin tidak bergairah, bahkan cenderung frustrasi, maka diperlukan suplemen penambah gairah, penghangat suasana. Namun, disaat yang lain ada kalanya datang suasana yang panas, gairah dan emosi maka dibutuhkan pemadam emosi dan pendingin suasana, maka jangan menjadi sebaliknya, disaat pasangan sedang emosi, malah ditambahi dan dibuat emosinya, dibakar emosinya menjadi-jadilah kobaran apinya.
2. Pakaian sebagai penutup aurat, aurat adalah yang menyebabkan kita malu bila dilihat atau diketahui orang lain. Seseorang akan sangat malu bila aibnya disebar, oleh

---

<sup>80</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung:Mizan, 1996), h. 209

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu menutup aurat/aib orang termasuk akhlak terpuji dan membuka aib orang tergolong akhlak tercela.

3. Pakaian sebagai penghias tubuh, dengan pakaian yang kita pakai, tubuh yang sudah indah akan bertambah cantik, bertambah ganteng. Al-Qur'an mengajari para istri agar berfungsi melengkapi kekurangan suaminya dan sebaliknya. Inilah filosofi pakaian yang Allah pergunakan dalam menggambarkan hubungan suami-istri.<sup>81</sup>

Ayat-ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki perkawinan dan hubungan suami-istri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Implementasi perintah al-Qur'an ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW disinyalir dalam hadist, Aisyah r.a. menjelaskan perilaku simpatik Nabi Muhammad SAW. ketika sedang bersama istrinya di rumah. Aisyah menuturkan:

عن الأسوَادِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ خَرَجَ

إِلَى الصَّلَاةِ<sup>82</sup>

“Dari aswad berkata: saya bertanya kepada Aisyah r.a. Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya? Aisyah menjawab “Beliau berada dalam tugas keluarganya-yakni membantu pekerjaan keluarganya-sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat”. (H.R. Bukhari).

<sup>81</sup> Jumni Nelli, *Op.cit.* h. 104

<sup>82</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz V, h. 5048

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah dalam riwayat Ahmad merinci pekerjaan Nabi SAW ketika di rumah. Beliau menjahit baju, sandal, memerah sapi kambing, melayani dirinya sendiri serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan perempuan.<sup>83</sup> Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar tidak ragu-ragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering dijadikan sebagai pekerjaan perempuan. Bahkan dalam hadist lain Nabi mengungkapkan suami ideal adalah yang bersikap paling baik pada istri dan keluarganya. Sebagaimana hadist berikut ini,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>84</sup>

“Dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah SAW. Bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keuarga.” (H.R. Ibnu Majah)

Hadist di atas memberikan ilustrasi tentang hubungan suami-istri yang dilakukan Nabi SAW, dengan setting budaya Arab yang patriarki, apa yang dilakukan dan disarankan Nabi SAW adalah sesuatu yang cukup aneh pada masa itu. Tergambar dalam kehidupan dengan bersikap dan bertindak dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *sakinah mawaddah wa rahmah* serta keseimbangan hak dan kewajiban. Rasulullah telah membuktikan bahwa dengan hubungan yang baik dan cara pandang yang positif sebuah keluarga akan mendapat kehidupan yang dicita-citakan.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 5049

<sup>84</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), Juz 1, h. 636

<sup>85</sup> Jumni Nelli, *Op.cit.*, h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab mengatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-istri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.<sup>86</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Tholhah Hasan, hubungan suami-istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Pergaulan suami istri pada hakikatnya, tidak hanya istri yang dituntut untuk mempergauli suami dengan baik dan tidak berhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli istrinya secara baik dengan cara yang lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya serta melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.<sup>87</sup>

Khoiruddin Nasution mengungkapkan terdapat 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya mengenai relasi suami istri, yaitu: prinsip musyawarah, prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram, prinsip anti kekerasan, prinsip bahwa relasi suami-istri adalah patner dan prinsip keadilan.<sup>88</sup>

Perundang-undangan perkawinan Indonesia juga membuat prinsip dasar menyangkut relasi suami-istri yaitu, prinsip

<sup>86</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, (Yogyakarta:LKis, 2001), h. 61

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 62-63

<sup>88</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia & Tazzata, 2004), h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersamaan; dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, prinsip keseimbangan; dalam arti bahwa keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, prinsip mempunyai hak yang sama di pandangan hukum, dan terakhir prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling membantu.<sup>89</sup>

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat dan hadist di atas serta ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa hubungan suami-istri harus dibina atas dasar iman yang tulus kepada Allah, kesetiaan, kasih sayang, saling pengertian, musyawarah, keterbukaan di antara pasangan. Hubungan suami istri tidak dapat dibina dan ditegakkan atas dasar pemaksaan kehendak, pengekanan dan eksploitasi ataupun penipuan, kepalsuan dan kepura-puraan.

#### E. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Akibat hukum dari akad nikah (perkawinan) adalah timbul hak dan kewajiban.<sup>90</sup> Hak disini ialah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>91</sup> Hak suami merupakan kewajiban istri, kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitulah konsep hak dan kewajiban dalam perkawinan.

<sup>89</sup> UU No 1 tahun 1974 jo KHI

<sup>90</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munâkahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 155

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk mewujudkan misi pernikahan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Itulah sebabnya penetapan hak dan kewajiban tersebut dilandasi oleh prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan dalam hubungan suami istri. Prinsip ini diisyaratkan firman Allah dalam al- Qur'an surat Al-Baqarah [2]:228 berikut,

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ.....  
 “..... Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri nya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana...”<sup>92</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa istri memiliki serangkaian hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami. Posisi hak yang dimiliki istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya dan kewajiban yang ditunaikan oleh istri itu merupakan hak suami. Hak tersebut seimbang dengan kewajibannya. Hak-hak antara suami dan istri kembali kepada kebiasaan yang berlaku pada daerah setempat, dan hal ini berbeda-beda tergantung waktu, tempat keadaan, orang dan adat kebiasaan.<sup>93</sup> Misalnya wajibnya taat bagi istri kepada suami. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga sekaligus yang menafkahnya. Kemudian adanya kalimat *lirrijali 'alaihinna darajah* yang oleh *mufassir* dipahami

<sup>92</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 36

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut:Dar al-Fikr, 2006), h. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kelebihan (tanggung jawab/kewajiban) bukan kelebihan kemuliaan, menunjukkan adanya suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami tetapi tidak dibebankan kepada istri.<sup>94</sup>

Hak-hak dalam perkawinan terbagi kepada tiga bagian, yaitu: hak-hak istri, hak-hak suami dan hak-hak bersama antara suami dan istri. Mengenai hak dalam perkawinan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri adalah serangkaian hak yang harus diterima oleh istri dari suami atau dengan kata lain hak-hak istri adalah serangkaian kewajiban yang mesti diberikan suami kepada isteri. Hak tersebut terbagi kepada dua bentuk: hak memperoleh materi (*maaliyah*) dan hak mendapatkan non materi (*ghairu maaliyah*).

##### a. Hak Materi (*Maaliyah*)

Hak materi (*maaliyah*) adalah kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri berupa harta yakni mahar dan nafkah.

##### 1) Mahar

Mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.<sup>95</sup> Para ulama fiqh

<sup>94</sup> Jumni Nelli, *Loc.cit*

<sup>95</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 251

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan mahar sebagai berikut, ulama Hanafiyah mendefenisikan:

ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء<sup>96</sup>

*“Mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad nikah ataupun persetubuhan”*

Ulama Malikiyah mendifenisikan mahar adalah:

ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها<sup>97</sup>

*“Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.”*

Mazhab Syafi’i mengartikan mahar sebagai berikut,

ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً، كرضاع ورجوع شهود<sup>98</sup>

*“Sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurya para saksi.”*

Sedangkan menurut Hanabilah mahar ialah,

العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكروهة<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan syubhat dan persetubuhan secara paksa.”

Mahar ini memiliki sepuluh nama, yaitu: *mahar*, *shidaaq*, *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibaa*, *‘uqr*, *‘alaa’iq*, *thaul* dan *nikah*.<sup>100</sup>

Hukum memberikan mahar kepada istri adalah wajib berdasarkan dalil al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalil wajibnya mahar dalam al-Qur’an adalah berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْئِيًّا

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>101</sup>

Maksudnya pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan para fuqaha. Ada juga yang berpendapat, ditujukan kepada para wali karena pada masa jahiliyah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya sebagai *nihlah*.<sup>102</sup> Hal ini merupakan

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.*, h. 77

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simbol bagi kemuliaan seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan. Allah SWT berfirman,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban*

Dalam ayat lain juga disebutkan,

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

*“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;”*<sup>103</sup>

Dalil hadist Rasulullah SAW,

الْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>104</sup>

*“Carilah! Walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”* (H.R. al-Turmudzi).

Hadist di atas memberikan pengertian bahwa suami wajib memberikan mahar walaupun sekedar cincin yang terbuat dari besi. Perkawinan Nabi SAW tidak pernah terlepas dari mahar. Sunnah menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah SAW tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), Juz 7, h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya pada Nabi SAW.<sup>105</sup>

Dalil selanjutnya *ijma'*, kaum muslimin telah sepakat ditetapkannya mahar dalam pernikahan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya. Ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>106</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 253

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mistil*.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

Pasal 37

<sup>107</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan<sup>108</sup> untuk menertibkan masalah mahar, menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”, menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi.

Hikmah wajib memberi mahar kepada istri sangat banyak sekali, antara lain: menunjukkan pentingnya posisi akad nikah, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan posisi perempuan, sebagai alasan kuat untuk selalu membina kehidupan perkawinan, sebagai bentuk niat baik dari suami kepada istri, perwujudan komitmen akan menggauli istri dengan baik demi keberlangsungan perkawinan, serta dengan adanya mahar seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 40.

<sup>109</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie el-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), Jilid 9, h. 232

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Nafkah**

Nafkah adalah kewajiban *maaliyah* (materil) yang harus diberikan suami kepada istri . Menurut bahasa, kata nafkah seakar kata dengan kata *infak* yang berarti *ikhraj* (pengeluaran yang dipergunakan untuk kebaikan). Kata *nafkah* dalam bentuk pluralnya *nafaqaat* berarti *maynfiqihul insani 'ala 'iyalihi* (nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya). Menurut terminologi *syara'* nafkah adalah *kifayatun man yamunuhu mina al-tha'am, al-kiswah, wa sukkan* (memberikan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan). *Al-tha'am* (kebutuhan pangan) mencakup roti, daging, dan minuman, sementara *al kiswah* (kebutuhan sandang) termasuk di dalamnya pakaian penutup dll. *Sukkan* (tempat tinggal) adalah rumah dan isinya seperti lampu, air, alat kebersihan dan lain lain sesuai tradisi daerah masing-masing.<sup>110</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah mencukupi segala kebutuhan makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat meskipun dia orang kaya.<sup>111</sup>

Ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang beragama Islam

<sup>110</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus:Dar al-Nasyirah, t.t.), h. 83

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sayyid Sabiq Jilid II* , alih bahasa Asep Sobari dkk, (Jakarta Timur : al-'Itishom, 2008), h. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun kafir dengan pernikahan yang sah. Berdasarkan dalil al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'*. Dalil kewajibannya menurut al-Qur'an sebagai berikut,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.<sup>112</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.<sup>113</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>114</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki

<sup>112</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.*, h. 38

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 559

<sup>114</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya lapang dan leluasa berbelanja. Penjelasan “dan orang yang disempitkan rezekinya” yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>115</sup>

Dalil-dalil berdasarkan hadist Rasulullah SAW adalah sebagai berikut,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَقِيه  
 نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادُ بْنُ  
 سَلَمَةَ، نا أَبُو قَزَعَةَ سُؤَيْدُ بْنُ حُجْرٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ  
 الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا

<sup>115</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lintera Hati, 2002 ), h. 303



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهِ؟ قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا

تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " <sup>116</sup>

*"Dari Abu Abdillah al-Hafizh dari Abu al-Nadri Muhammad bin Yusuf al-Faqih dari Ustman bin Said al-Darimi dari Musa bin Ismail dari Hammad bin Salamah dari Abu Qaza'ah Suwaidah bin Hujair al-Bahily dari Hakim dari Muawiyah al-Qusyairi dari ayahnya ia berkata: aku berkata: ya Rasulullah! Apa hak istri yang harus kami tunaikan? Nabi SAW menjawab; kamu berikan dia makan jika kamu makan, dan berikan dia pakaian jika kamu memakai pakaian, jangan pukul wajahnya, jangan kamu buat dia menjadi buruk dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. (HR. An-Nasa'i).*

Hadist di atas menjelaskan tentang kewajiban suami, yaitu: memberikan nafkah makan dan pakaian kepada istri sesuai dengan ukuran kemampuan suami. Hadist di atas juga melarang memukul wajah istri, menjelek-jelekkan istri dan meninggalkan istri kecuali di rumah. <sup>117</sup>

Sebab, istri merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilindungi, dalam hadist lain disebutkan,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ حَجِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَخُطْبَتِهِ بِعَرَفَةَ قَالَ: « فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

<sup>116</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1424 H), Cet-3, Jilid 7, h. 497

<sup>117</sup> Faishal bin Hamdan al-Mubarak al-Najdi, *Tathrizu Riyadh al-Shalihin*, (Riyadh, Dar al-'Ashimah li an-Nashri wa al-Tauzi', 2002), h. 204

أَنْ لَا يُوطِنَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ فَإِنْ فَعَلَنَّ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا  
غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>118</sup>

Dari Abu Abdillah al-Hafizh dari Muhammad bin Ya'qub dari 'Amr bin Zurarah dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir ketika Nabi SAW berhaji dan berkhotbah di 'Arafah ia berkata: "Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian, jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik". (HR. al-Baihaqi).

Menjaga Istri berarti menjaga amanah Allah, cara menjaga amanah itu adalah dengan memberikan nafkah harta dan pakaian sesuai kemampuan suami.<sup>119</sup> Perilaku pelit terhadap istri merupakan perbuatan tercela, karena itu bila ada suami pelit memberikan nafkah, istri boleh mengambil sendiri harta suaminya untuk nafkah mereka, disebutkan dalam hadist,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ  
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا  
يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>120</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>118</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Kubra Wa Fii Zailihi Jauhar Al-Naqi*, (Mesir: Mauqi' Wizaratu al-Auqaf al-Mishriyyah, 1344 H), Juz 7, h. 295

<sup>119</sup> Al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan Syarah Sunan Abi Daud*, (Halb: Mathba'ah al-Ilmiyah, 1932), Juz 2, h. 197

<sup>120</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Op.cit.*, h. 85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (HR. al-Bukhari).

Berdasarkan beberapa hadist di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Bahkan, pada hadist kasus hindun di atas menunjukkan bahwa kalau suami tidak menafkahi istri atau tidak cukup kadarnya, maka istri boleh mengambil harta suaminya.

Kemudian dalil *ijma'*, seluruh ulama sepakat menafkahi istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami selama mereka telah baligh, kecuali jika istrinya membangkang. Pernyataan *ijma'* ini Ibnu al-Mundzir dan lainnya. Ibnu al-Mundzir berkata, dalam hal ini ada poin penting, yaitu ketika istri terbatas oleh keberadaan suami hingga dapat melarangnya berbuat dan bekerja maka suami berkewajiban memberikannya nafkah.<sup>121</sup>

#### b. Hak Non Materi (*Ghairu Maaliyah*)

Adapun hak-hak istri yang berbentuk non materi adalah mendapat perlakuan baik, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga.

##### 1) Perlakuan Yang Baik

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 342

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami wajib menggauli istri dengan baik. Kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram.

Setiap pasangan suami-istri harus saling memperlakukan dengan penuh kebaikan, dengan cara menemaninya dengan baik (*shuhbatul jamilah*), berusaha untuk tidak saling menyakiti, tidak menahan yang seharusnya menjadi hak pasangan, selalu menampilkan wajah bahagia terhadap apa yang ia berikan walaupun sebenarnya tidak disukai, selalu memperlakukan pasangan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan, jangan membalas perlakuan baik pasangan dengan menyakitinya karena ini termasuk perbuatan *ma'ruf* (kebaikan) sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai*



sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>122</sup> (Q.S. al-Nisa’ [4]: 19)

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ bermakna perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi.<sup>123</sup> Oleh karena itu dalam interaksi pergaulan suami dengan isteri, suami dituntut untuk tetap arif dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama isterinya. Yang dimaksud dengan ‘*usyrah*’ adalah kedekatan dan kebaikan yang terjadi antara suami dan isteri.

Quraish Shihab memaparkan ayat tersebut merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada istri nya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata (معروف) *ma’ruf*, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.<sup>124</sup>

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Kasir mengenai ayat ini, bahwa seorang suami

<sup>122</sup> *Op.cit.*, h. 80

<sup>123</sup> Abu Ja’far al-Thabari, *Jami’ Bayan Fii Ta’wil al-Qur’an*, (Muassasah al-Risalah, 2000), Juz 8, h. 122

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Op.cit.*, h. 382

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya bertutur sapa dengan baik kepada istrinya, dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilannya terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana apa yang disukai suami pada istrinya, oleh karena itu seorang suami pun harus melakukan apa yang disukai oleh istrinya.<sup>125</sup>

Senada juga dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya Islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk mempergauli istrinya dengan baik sekalipun suami tidak suka kepada istrinya suami harus tetap berhubungan dengan baik. Karena Islam menanamkan harapan baik barangkali ada rahasia dan hikmah tertentu dalam kegaiban yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tujuannya agar si suami tidak memperturutkan emosinya saja karena dapat melepaskan jalinan hubungan suami istri yang mulia, karena boleh jadi terdapat kebaikan pada apa yang tidak disukainya, sedang dia tidak tahu.<sup>126</sup>

Secara sederhana dalam ungkapan lain dapat dipahami dari ayat ini adalah Allah menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan

<sup>125</sup> Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, h. 202

<sup>126</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4..., h. 164

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Jika ada yang menegakkan hal itu bersama istri nyamaka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah. Jika ada suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal itu tidak dibenarkan sama sekali.<sup>127</sup>

#### 2) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istri nya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin perempuan (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istri nya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.<sup>128</sup>

Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian

<sup>127</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 188

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 191

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan pada istri nya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.<sup>129</sup> Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; Diatasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>130</sup>

Dalam *Tafsir al-Misbah* dinyatakan bahwa: Ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari

<sup>129</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 157

<sup>130</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14., h. 326



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syari''at* Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.<sup>131</sup>

Ayat di atas ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan sebenarnya harus bermula dari lingkungan keluarga di rumah. Sehingga sang suami pun harus mencontohkan bagaimana kelakuan baik yang sesuai dengan *syari''at* Islam. Dan diharapkan dari contoh tersebut sang istri bisa mengikuti dan lebih mendalami apa yang harus dikerjakannya sesuai *syari''at* Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dengan cara memberikan pemahaman tentang Islam (dakwah) dan mendidik istri dan keluarganya untuk melaksanakan apa yang telah Islam ajarkan.<sup>132</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Kasir, bahwa seorang suami harus memerintahkan pada istri nya untuk selalu berzikir dan taat kepada Allah. Dan dia juga harus mencegah istri nya itu untuk melakukan suatu perbuatan yang durhaka pada Allah. Dan para suami itu harus mencontohkan dengan mengamalkan perintah-

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 326

<sup>132</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 22..., h. 207

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah kemudian membantu para istri nya tersebut untuk ikut juga mengamalkannya. Dan jika istri nya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang Allah maka sang suami harus menegur bahkan diperbolehkan untuk marah agar istri nya tidak mengulangi kesalahannya tersebut.<sup>133</sup>

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.<sup>134</sup>

#### 3) Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istri nya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin perempuan (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Allah swt. berfirman:

<sup>133</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28...*, h. 202

<sup>134</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-Fishom Cahaya Umat, 2007), h. 719



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>135</sup> (Q.S an-Nisa” [4]: 34)

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istri nya. Kata (الرِّجَالُ) *ar-rijal* seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan sebagai lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.<sup>136</sup> Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari kata (قوام) *qawam*, yang terambil dari akar kata (قام) *qama*. Kata (قوام) *qawwamun* dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan (الرِّجَالُ) *rijal* yang berarti banyak

<sup>135</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., h. 422

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 424

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>137</sup>

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan kelurganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Allah swt. telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan pertimbangan: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) *bima fadhhdhala-llahu ba'dhahum 'ala ba'ad* karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan.

Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh seorang lelaki, lebih menunjang kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di sisi

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 425



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>138</sup>

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya lelaki dibekali dengan kekhususan-kekhususannya sendiri. Mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Berbeda dengan perempuan yang dibekali dengan kekhususan-kekhususan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan terlebih dahulu. Karena seluruh tugasnya sejak awal, yang dilakukan lelaki dalam kehidupan hingga berperang adalah untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Sampai dalam mengatur kehidupan hingga semua tugasnya dalam kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus dipikirkannya. Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan si lelaki/suami lebih dapat melaksanakan

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 426

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapangannya. Seperti contoh, tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang dari tugasnya menjadikannya lebih layak menjadi pemimpin. Inilah unsur yang ditonjolkan oleh nash al-Qur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya.<sup>139</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila dalam keluarga terjadi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana musyawarah adalah jalan yang sangat dianjurkan al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

#### 2. Hak-Hak Suami

Hak dari suami adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri

<sup>139</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4..., h. 238

untuk suaminya yang akan dijabarkan berikut ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami.

a. Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Allah swt. telah menunjuk suami sebagai pilar dan pemimpin bagi keluarganya sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digaris bawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Hanya perempuan shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri, ia takut kepada Allah dengan media suaminya serta merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya. Allah swt. berfirman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, *Sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka, maksud dari perempuan shaleh disini ialah perempuan yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istri nya. Disamping itu, para perempuan ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempat, karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istri nya.<sup>140</sup>

Ibnu Katsir pun juga memaknainya seperti itu, yang mana menurutnya “*as-Shalihat*” dalam ayat tersebut berarti wanita-perempuan yang saleh, dan “*Qanitat*” berarti istri-istri yang taat kepada suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa perempuan shaleh yang dipaparkan dalam ayat tersebut bermakna perempuan yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.<sup>141</sup> Dengan kata lain, istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama perempuan muslimah yang shaleh.

#### b. Memberikan Ketenteraman Pada Suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 423

<sup>141</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5...*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Allah swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas mencerminkan pembuktian kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketenteraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.<sup>142</sup> Kata (أَزْوَاجًا) *azwaj* dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri -istri. Dan kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* menunjuk pada perempuan, serta kata (لَكُمْ) *lakum* menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* yang dirangkai dengan kata (لِتَسْكُنُوا) *li taskunu* mengandung makna yang berarti *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung kepadanya.<sup>143</sup> Dalam memahami ayat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa manusia harus mengingat kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka pasangan dari diri mereka sendiri, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dari rasa cinta di dalam jiwanya, juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang. Sehingga manusia dapat memahami hikmah Sang Khalik dalam menciptakan pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya yakni kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai, dan tenteram dari pasangannya.<sup>144</sup>

Ibnu Kasir mengungkapkan bahwa, termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam, karena Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih sayang diantara pasangan-pasangan itu. Sehingga mereka bisa merasakan ketenteraman dari pasangan (istri) mereka itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu merasa lelah dengan rutinitasnya sehingga ketika ia pulang ke rumah ia berharap ada seseorang yang bisa membahagiakan dan menenteramkan hatinya seperti seorang istri.<sup>145</sup>

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>144</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 17..., h. 206

<sup>145</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 21...*, h. 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suami. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut, ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu menenteramkan hati pasangannya.<sup>146</sup>

#### c. Berkabung Untuk Suaminya Ketika Meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.<sup>147</sup>

Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan terkait ayat, *Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan*

<sup>146</sup> Muhammad As-Sayid Az-Za'balawi, *al-Umumah fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyah*, h. 156

<sup>147</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, h. 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*meninggalkan istri-istri, hendaklah...* dari redaksi ayat tersebut sepintas terlihat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia. Tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Menurut mereka, ayat ini ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal menjadi petunjuk dari ayat ini. Walaupun ayat ini menjadi perintah yang ditujukan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istri nya bahwa seandainya mereka meninggal nanti, maka janganlah istri nya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. Dan begitu suaminya meninggal, janganlah para istri langsung menampilkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi ada baiknya hendaklah mereka menunggu, paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat *menunggu dengan menahan diri mereka sendiri*, mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar.<sup>148</sup>

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibnu Katsir bahwa, ayat ini merupakan perintah dari Allah yang ditujukan untuk

<sup>148</sup> *Ibid.*, h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita-perempuan yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi para istri tersebut wajib hukumnya untuk ber-ihdad (berbelasungkawa) atas kematian suaminya selama ia menjalani masa iddahnya.<sup>149</sup> Dalam *Tafsir al-Azhar*, hal senada juga diungkapkan oleh Hamka, bahwasanya ayat ini memberi perintah bahwa laki-laki yang meninggal dunia sedang dia beristri, maka istri itu harus menahan diri atau berkabung, lamanya empat bulan sepuluh hari. Menurutnya ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah kepada tegaknya suatu rumah tangga, dan betapa pula terjalannya kisah cinta suami-istri. Sehingga perkabungan diakui dan diatur di dalam al-Qur'an.<sup>150</sup>

#### d. Memahami Posisi Suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

Allah swt. Berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

<sup>149</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2...*,

<sup>150</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz II...*, h. 239

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) *wa lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bi al-ma''ruf* Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma''ruf*, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.<sup>186</sup>

Al-Qurtubi mengatakan bahwa tingkatan kelebihan yang dimiliki suami atas istri nya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada hak istri atas suami.<sup>151</sup> Sementara Ibnu Kasir memaknai tingkatan kelebihan yang dimiliki suami ini adalah keutamaan dalam hal pembawaan akhlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaannya di dunia serta akhirat.<sup>152</sup>

Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan sang Maha Pencipta di dalam kitab-Nya, yang harus di ketahui dan dipahami oleh seorang istri sehingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang di ridhai oleh Allah. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tak mampu di penuhi, membosankannya, dan juga tidak mengingkari kelebihannya atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah.

### 3. Hak-Hak Bersama Pasangan Suami Istri

- a. Halal melakukan hubungan suami istri dan sama-sama merasakan kenikmatan dari pasangannya. Kehalalan ini menjadi milik bersama. Suami halal mendapat kenikmatan dari hubungannya dengan istri, sebagaimana istri juga halal mendapatkan hal yang sama dari suami. Mendapatkan kenikmatan ini merupakan hak bersama dan tidak dapat

<sup>151</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 193

<sup>152</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2...*, h.125



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai kecuali jika mereka berdua merasakannya bersama-sama, karena tidak mungkin hanya dirasakan oleh salah satu pihak.

- b. Hubungan *mahram* berdasarkan *mushaharah* atau perbesanan. Maksudnya, istri menjadi *mahram* ayah, kakek, dan anak laki-laki suaminya sampai seterusnya. Sebaliknya, suami menjadi *mahram* bagi ibu, nenek, dan anak perempuan istri nya hingga seterusnya.
- c. Berlakunya hukum saling mewarisi mulai akad nikah dilangsungkan. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah akad, maka yang lain berhak menerima harta warisannya meskipun tidak sempat berhubungan badan.
- d. Ketetapan garis keturunan (*nasab*) anak yang lahir dari suaminya.
- e. Perlakuan yang baik. Baik suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TEORI KDRT DAN PEREMPUAN BEKERJA

##### A. Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

###### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdiri dari kata "kekerasan" dan "rumah tangga". Kata kekerasan (violence) adalah perihal yang berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.<sup>153</sup> Kekerasan juga memiliki pengertian bertindak dengan menggunakan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.<sup>154</sup> Pengertian kekerasan juga dapat kita temukan pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>155</sup> Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan

<sup>153</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1994), h. 485

<sup>154</sup> Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta:LKIS, 1987), h. 141

<sup>155</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>156</sup> Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence*" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata Kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.<sup>157</sup> Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence*" tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Menurut Mufidah, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap orang atau sejumlah orang yang berposisi lemah. Berdasarkan kekuatannya baik fisik maupun nonfisik superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan ressa derita dari pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.<sup>158</sup>

Sementara arti rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah, berkenaan

<sup>156</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: *Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 154

<sup>157</sup> Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7.

<sup>158</sup> Mufidah ch, *Paradigma Gender*, cet II, (Malang:IB Bayu Media, 2004), h. 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keluarga.<sup>159</sup> Lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>160</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>161</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap suami, isteri, anak, orang-orang yang

<sup>159</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/RUmah%20Tangga>, terakhir diakses 11 oktober 2019.

<sup>160</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 3

<sup>161</sup> Republik Indonesia, *Ibid.*, h. 1



mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 bentuk, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, lebih jelasnya dalam pembahasan berikut ini.

### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>162</sup> Perbuatan yang tergolong kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik dan diseret.<sup>163</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang mengakibatkan: cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari,

<sup>162</sup> Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 4

<sup>163</sup> Hadijah dan Laa jama, *Op.cit.*, h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian korban.

- 2) Kekerasan fisik ringan berupa, menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya, yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.<sup>164</sup>

#### b. Kekerasan Psikis

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.<sup>165</sup>

Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu:

<sup>164</sup> LBH APIK Jakarta, *"Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"* (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

<sup>165</sup> Republik Indonesia, *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal: (a) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun, (b) gangguan stress pasca trauma, (c) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), (d) depresi berat atau destruksi diri, (e) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya dan bunuh diri.
- 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal, ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencernaan tanpa indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.<sup>166</sup>

#### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.<sup>167</sup>

Dalam penjelasan pasal 8 undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan karakteristik kekerasan seksual yaitu: "setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu".<sup>168</sup>

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH APIK Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa,

<sup>166</sup> LBH APIK Jakarta, *Op.cit.*

<sup>167</sup> Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 4-5

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
- (b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
- (c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
- (d) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- (e) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
- (f) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
- (g) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan kekerasan fisik lainnya.<sup>169</sup>

<sup>169</sup> LBH APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga atau dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah kekerasan ekonomi terdapat pada pasal 9 yang menyebutkan; setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>170</sup>

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi dua tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.

<sup>170</sup> Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

3. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap Wanita. Karena Deklarasi tersebut tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention The Elimination Of All Form Af Discrimination Againt Women*.<sup>171</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi tersebut mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Sampai 18 maret 2005 telah 180 negara yang meratifikasinya yang berarti secara resmi mengikat diri menyelaraskan

<sup>171</sup> Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum negaranya dengan CEDAW dan secara terencana melakukan upaya peningkatan kesederajatan dan kesamaan hak.<sup>172</sup>

Karena ketentuan Konvensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 menandatangani Konvensi tersebut.<sup>173</sup> Berdasarkan pertimbangan itu, maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>174</sup>

Harapannya, dengan diundangkannya undang-undang tersebut segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat dieleminir dan dihapus di bumi Indonesia, namun kenyataan menunjukkan, bahwa keberadaan undang-undang nomor 7 tahun 1984 tersebut belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi kaum perempuan Indonesia.<sup>175</sup>

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap

<sup>172</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. 2

<sup>173</sup> Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. I, h. 33-34

<sup>174</sup> Hadijah dan La Jama, *Loc.cit.*

<sup>175</sup> *Ibid.*



perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya, karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privasi.

Menurut informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik, mencatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di jabodetabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69-74%). Sementara itu lembaga Rifka Annisa telah menerima pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang kekerasan yang terjadi terhadap isteri di Yogyakarta dan Jawa Tengah.<sup>176</sup>

Karena maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998.<sup>177</sup>

Dalam pasal 1 Kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

<sup>176</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>177</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Fokus Media, 2004), h. 79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan. Komisi ini memiliki tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, bahwa yaitu:

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- b. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.<sup>178</sup>

Dilihat dari tujuannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan hanya sebatas perangkat aturan yang bertugas melakukan langkah-langkah preventif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan belum merupakan perangkat hukum yang secara tegas menindak pelaku kekerasan.

Keberadaan komisi ini tentu tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, kasus kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di tanah air. Berita kekerasan terhadap perempuan pun semakin melonjak dan selalu menghiasi koran dan televisi, ini menunjukkan betapa seringnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Data Solidaritas Perempuan Untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) selama April 2003-Maret 2004 dalam lingkup Database Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan Bersama

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mitra Perempuan, SPEK-HAM mencatat pengaduan dan bantuan kasus baru sebanyak 25 perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Eks Keresidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri). 36% dari 25 perempuan yang memanfaatkan layanan SPEK-HAM telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, 28% perempuan yang menjadi korban adalah anak-anak, 44% dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual, 68% dari perempuan mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan tekanan secara ekonomi).<sup>179</sup>

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga istri memilih berdamai dengan suaminya meski ia berkali-kali dianiaya, bahkan diperkosa (dipaksa berhubungan seksual) dengan cara yang menyedihkan, seperti memasukkan terong ke vagina istri. Namun pada kasus istri tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, ia lebih memilih untuk segera melepaskan diri dari ikatan perkawinan mereka. Itu merupakan cara yang dianggap paling aman dan cepat ketimbang memproses ke jalur pidana. Selain itu juga karena faktor kekhawatiran akan balas dendam dari suami atau keluarga besar suami. Dapat dikatakan kebanyakan kasus KDRT diselesaikan secara perdamaian. Meskipun ada yang melaporkan kasusnya ke kepolisian, namun lebih

---

<sup>179</sup> *Op.cit.*, h. 20-21

banyak yang tidak diteruskan dan lebih menjadikan pelaporan itu sebagai bukti atau alasan perceraian.<sup>180</sup>

Karena itu, sejak tahun 1996 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta telah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani terus bertambah dari tahun ke tahun. Mulai dari 90 kasus (1998), 295 kasus (1999), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 672 kasus (2003) dan terakhir sebanyak 817 kasus di tahun 2004.

LBH APIK Jakarta menjadikan kasus-kasus yang masuk sebagai titik tolak untuk melakukan upaya advokasi dalam rangka merubah hukum kearah yang lebih setara dan adil. Hal ini diwujudkan dengan mengkritisi sejumlah kebijakan yang diskriminatif, seperti KUHP, UUP No.1/1974, maupun dengan mengajukan kebijakan baru antara lain dengan menyusun serta mensosialisasikan RUU anti KDRT sejak tahun 1997.<sup>181</sup>

Selanjutnya sejak tahun 2002 LBH APIK Jakarta bersama-sama dengan Komisi Nasional Perempuan, Convention Watch Universitas Indonesia dan Derapwarapsari melakukan kajian tentang peluang dan pentingnya suatu sistem peradilan pidana terpadu bagi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan.<sup>182</sup>

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 22

<sup>181</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html>, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.

<sup>182</sup> *Op.cit.*, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjuangan dan proses advokasi RUU Undang-Undang KDRT melibatkan anggota DPR khususnya Komisi VII, Fraksi TNI, dan GOLKAR, yang bekerja sama dengan forum parlemen soal bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan terhadap anggota dewan yang akan meload RUU ini melalui jalur inisiatif. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan bekerja sama dengan vocal point LSM yang mendampingi program KDRT dan kalangan akademisi, anggota DPRD dan pemerintah setempat, termasuk aparat penegak hukum terlibat, baik polisi, jaksa maupun hakim.

Dengan demikian RUU KDRT dapat berhasil disahkan DPR dan Pemerintah dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah mengalami proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak.<sup>183</sup>

RUU yang menjadi inisiatif DPR sejak Mei 2003 itu akhirnya disahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 september 2004 yang dimuat dalam 10 Bab 56 Pasal, sekaligus membuka babak baru dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Sebagaimana diketahui UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT lahir dari desakan masyarakat yang menghendaki adanya suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga, desakan ini muncul setelah melihat pengalaman korban

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, sangat sulit memperoleh perlindungan hukum. Sistem hukum yang ada dirasa sangat tidak berpihak terhadap korban perempuan. UU yang telah disahkan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan korban dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal penting yang telah terakomodir dalam UU ini adalah, adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindak pidana. KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan majikan (orang yang mempekerjakan dan keluarganya). Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik (dimana orang lain tidak berhak ikut campur) tetapi telah dianggap sebagai masalah publik (orang lain berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat diakui secara hukum), kecuali untuk kekerasan seksual suami istri kekerasan, fisik dan psikis yang termasuk dalam kategori berakibat ringan, adanya hukuman minimal yang diterapkan dalam kekerasan seksual. Adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Diperbolehkannya relawan pendamping dan penasihat hukum korban untuk mendampingi korban disetiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan). Adanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan pidana tambahan diluar penjara atau denda berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, diakuinya keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Diakuinya keterangan seorang saksi korban berupa surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai Alat Bukti. Adanya pelayanan kesehatan bagi korban. Adanya kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, kecuali ada alasan yang patut. Adanya kemungkinan bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penahanan tanpa surat perintah, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

Dalam konsiderans undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pertimbangan diberlakukannya undang-undang ini adalah,

- 1) Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- 4) Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kemudian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Keadilan dan kesetaraan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Ketidakadilan gender (gender inequalities) adalah perlakuan tidak adil muncul karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial budaya yang kental dengan nuansa patriarkhi sering menempatkan relasi gender secara timpang dan berujung pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Hal ini berawal dari prasangka, yakni suatu pandangan yang terformulasikan dari informasi keliru yang berawal dari keyakinan dianggap benar terhadap suatu hal, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebagai contoh, perempuan diyakini lemah dan tidak berdaya, padahal kenyataannya banyak perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki.

Berdasarkan analisis gender, ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender, sebagai berikut:

#### (1) Subordinasi (Penomorduuan)

Pada dasarnya subordinasi merupakan pengkondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan sehingga dia harus bergantung dan menjadi subordinat pada orang lain. Subordinasi antara lain disebabkan oleh relasi gender yang timpang sehingga mengakibatkan subordinasi salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika perempuan tidak diakui dan tidak diperhatikan. Misalnya perempuan sebagai “konco wingking” (orang belakang), perempuan dinomorduakan dalam peluang di bidang politik, jabatan, karier dan pendidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**(2) Marjinalisasi**

Marjinalisasi merupakan suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jika subordinasi biasanya digunakan untuk aspek sosial-politik maka marjinalisasi biasanya merujuk pada peminggiran aspek ekonomi, sehingga yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Salah satu cara melakukan marjinalisasi adalah dengan menggunakan asumsi gender.

**(3) Beban ganda**

Istilah beban ganda digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana dia harus menampung dua wilayah kerja sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban ganda biasanya terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah dan masih harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja domestik mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara itu dia juga dituntut bersikap profesional ketika melakukan kerja di kantor.

**(4) Kekerasan**

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Kekerasan yang dialami perempuan pada umumnya terjadi karena perbedaan gender, meliputi; kekerasan fisik, kekerasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikis, kekerasan seksual dan kekerasan yang berdimensi ekonomi yang dalam UU P-KDRT disebut penelantaran rumah tangga, Sedangkan kekerasan fisik misalnya, memukul, menganiaya, membunuh. Kekerasan psikis merujuk pada serangan kondisi mental seseorang.

**(5) Stereotype (Pelabelan Negatif)**

Stereotype pada dasarnya merupakan pelabelan secara negatif terhadap salah satu pihak dalam pola hubungan relasi antar dua pihak. Pelabelan muncul karena ada relasi kuasa yang saling mempengaruhi dan mendominasi. Biasanya pihak yang dominan akan lebih melakukan pelabelan negatif, memproduksinya terus menerus dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Pelabelan ini sering menjadi legitimasi untuk membenarkan tindakan satu kelompok yang dominan kepada pihak lain atau kelompok lain, misalnya: Perempuan: sumur – dapur – kasur; atau perempuan macak – masak – manak.

Pria tulang punggung keluarga. Laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah masa depan. Hal ini menyebabkan keluarga lebih cenderung menghabiskan uang yang tersedia untuk pendidikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, sedangkan anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini sangat merugikan perempuan, karena akan membatasi kemampuan wanita untuk bekerja atau meniti karier di luar rumah, dan di beberapa budaya daerah anak perempuan dianjurkan untuk menikah muda, guna meringankan beban ekonomi keluarga. Perempuan dilarang keluar pada malam hari, atau perempuan yang keluar pada malam hari adalah pelacur. Padahal sementara ini, banyak perempuan pekerja yang dikenakan kerja shift malam.

b) Non diskriminatif

Prinsip non diskriminatif menjadi kepedulian global, Pada tahun 1975 PBB menyelenggarakan konferensi dunia pertama di Mexico City dengan isu utama masalah diskriminasi gender yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan dinyatakan sebagai kejahatan yang mengancam kaum perempuan.

Setelah itu PBB menerbitkan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang pada tahun 1984 Pemerintah Indonesia meratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW. Pada pasal 1 (satu) CEDAW menyebutkan:

“Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

CEDAW yang dikenal sebagai Konvensi Wanita PBB memuat prinsip-prinsip: Prinsip persamaan substantive, prinsip non diskriminatif, prinsip kewajiban Negara. Prinsip tersebut memandang hak asasi wanita sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan Pemerintah dianggap mempunyai kewajiban mendasarkan kebijakannya dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu: persamaan kesempatan, persamaan untuk menikmati hasil pembangunan dan mendapat manfaat secara adil, seperti hak hukum dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

Prinsip non diskriminasi gender telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia telah menetapkan asas persamaan kedudukan dimata hukum (equality before the law) asas persamaan kedudukan dimata hukum termasuk perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 1993 di Wina Austria telah diadakan konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia yang mencetuskan perjuangan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dengan memperkenalkan ke masyarakat dunia bahwa Hak Asasi Perempuan adalah integral dan tidak dipisahkan dari hak asasi manusia secara universal, dengan demikian hak asasi perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan HAK PBB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, ancaman, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sebagai mana tersebut diatas melatar belakangi perlunya diundangkan UU No. 23 Tahun 2004 berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban.

Undang-Undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini.

Sebelum diundangkannya UU No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia baik dari KUHP maupun diluar KUHP tidak ditemukan istilah atau pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, bahkan di dalam KUHP, kekerasan terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tidak dianggap sebagai kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan hanya sebatas pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP. Sedangkan tujuan diundangkannya adalah, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan keterangan di atas jelas diuraikan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasann dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi paham feminisme.

## B. Ketentuan Perempuan Bekerja Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Perempuan Bekerja

Kata perempuan muncul dari kata per – empu –an. ‘Per’ memiliki makna makhluk dan ‘empu’ artinya mulia, tuan, atau mahir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia, atau memiliki kemampuan.

Dalam KBBI, kata perempuan bermakna (a) orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (b) istri; bini:nya sedang hamil; (c) betina (khusus untuk hewan), sedangkan kata perempuan bermakna perempuan dewasa: kaum, kaum putri (dewasa).<sup>184</sup>

Kedengarannya jauh lebih baik makna kata wanita, padahal pengertian kata perempuan menurut kamus kuno Jawa-Inggris dahulu bermakna ‘ yang diinginkan’, dalam hal ini perempuan dianggap sebagai objek, sesuatu yang diinginkan oleh pria. Sebaliknya, kata keperempuanan menurut KBBI di tahun 1988 justru bermakna ‘kehormatan sebagai perempuan’. Kata perempuan dan perempuan mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Kata perempuan ternyata mengalami proses perubahan makna yang semakin positif, sebutan tersebut merupakan bentuk halus dari kata perempuan. Sebaliknya, kata perempuan justru mengalami penurunan di mata masyarakat.

<sup>184</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, terakhir di akses tanggal 18 April



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini sebabnya nama lembaga yang ada adalah ‘Komnas Perempuan’ dan bukan ‘Komnas Wanita’, atau nama Kementerian yang melindungi kesejahteraan perempuan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan bukannya Kementerian Pemberdayaan Wanita. Kata perempuan yang terdengar indah dan elegan itu memiliki sejarah panjang sisa-sisa sistem feodal dan nuansa patriarki pada zaman dahulu. Kebalikannya, kata perempuan justru memiliki makna yang lebih kuat.

Dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Perempuan dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (*economically actives*).

Bekerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (mata pencaharian). Dikutip dari Omas Ihromi, yang dimaksud dengan perempuan bekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.<sup>8</sup> Dari sini, perempuan bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a. Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir.
- b. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.

## 2. Hukum Perempuan Bekerja

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
الَّتُّشُورُ

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk [67]: 15)<sup>10</sup>

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang rububiyah, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam *mukaddimah* kitabnya *al-Majmu'* menyatakan bahwa: umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi

semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.<sup>185</sup> Permasalahan tentang hukum perempuan bekerja masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang perempuan (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum perempuan bekerja dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama berikut ini.

Dalam hal ini Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan dikalangan ulama tentang perempuan bekerja di luar rumah. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat perempuan yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Peran perempuan secara alamiah, menurut pandangan ini adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain tugas perempuan adalah dalam sektor domestic. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Meski demikian dalam kondisi darurat perempuan diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan madyan ketika ayah mereka, nabi Syu'aib sudah lanjut usia.<sup>186</sup> Pendapat kedua menyatakan bahwa perempuan diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan,

<sup>185</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet. I, h. 357

<sup>186</sup> Naqiyah Mukhtar, *Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, h. 164.

dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaian. Perempuan yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaian dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.

Menurut Qasim Amin, pendapat yang mewajibkan perempuan harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperang dan pembunuhan (untuk memperebutkan kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan perempuan untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum perempuan menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relative aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak menjadi trend dalam mencari penghidupan.<sup>187</sup>

Singkatnya, Qasim Amin mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain.

---

<sup>187</sup> Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah al Sya'b, 1900), h. 86-88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan perempuan agar dia dapat mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan perempuan wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan perempuan agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.

Menurut Naqiya Mukhtar, pendapat yang melarang perempuan bekerja di luar rumah tampaknya selalu bertitik tolak dari asumsi adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan, tak dapat dibantah, memang merupakan tugas mulia demi kelangsungan umat, yang hanya bisa dilakukan kaum perempuan. Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestik yang lain. Mendidik anak, misalnya, adalah tugas kedua orangtuanya. Demikian juga mengatur rumah.<sup>188</sup>

Untuk lebih mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum perempuan karir (bekerja), dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama berikut, sebagaimana yang dikutip oleh Husein Syahatah dalam bukunya *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*.

Hasan al-Banna mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut perempuan bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam.

<sup>188</sup> Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, h. 108-109

Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki terhindar dari fitnahnya. Syarat utama adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Selain itu, menurut hemat penulis, fenomena maraknya perempuan yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingannya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat. Dari uraian beberapa fatwa para ulama muslim di atas, sepertinya mereka menganjurkan perempuan untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodratnya.

Menurut anggapan mereka keluarnya perempuan dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa perempuan seyogyanya tetap di dalam rumah, Yusuf al-Qardhawi berpendapat, surat al-Ahzab [33] ayat 33 yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itu pun pernah dilanggar oleh Sayyidah Aisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan hukuman *qishash* terhadap orang-orang yang telah membunuh Usman bin Affan. Kaum perempuan pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Maka dari itu, jika sesungguhnya dalam kesehariannya istri tidak diwajibkan bekerja di dalam rumahnya sendiri, apalagi jika dia bekerja di luar rumah guna membantu perekonomian keluarga, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia.

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria jika suami ridho dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang istri menerima nafkah, sebab “penahanan” atas sang istri merupakan hak suami.<sup>189</sup>

Selain itu Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan

---

<sup>189</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, *Op.cit*, h. 7378

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa “perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”<sup>190</sup>

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum perempuan yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosioogis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkis dan mungkin juga dipengaruhi oleh factor keamanan negara tersebut, di mana seorang perempuan jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan perempuan yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang perempuan muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *khalwat* (percampuran) antara perempuan dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para

<sup>190</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Op.cit.*, h. 275



pekerja perempuan dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.<sup>191</sup>

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang perempuan untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang perempuan ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum perempuan karir, terlihat jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum perempuan yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum perempuan (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum perempuan begitu pula sebaliknya.

Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai

---

<sup>191</sup> Muhammad Albar, *Perempuan Karir Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, h. 152-154.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerja (perempuan karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.<sup>192</sup>

Adapun syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan perempuan bekerja diantaranya,

- a. Pekerjaan dan profesinya sesuai dengan karakter seorang wanita, seperti menjahit, dokter, bidan dan guru.
- b. Butuh harta, karena banyaknya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
- c. Tidak berikhtilath dengan laki-laki ketika bekerjadan memakai hijab *syar'i* ketika bekerja.
- d. Lingkungan kerjanya tidak melakukan hal-hal yang haram.
- e. Tidak menyia-nyiakan apa yang lebih wajib dari pekerjaan seperti menjaga anak-anak dan menyiapkan kebutuhan mereka.
- f. Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan syariah dan halal dan perempuan tersebut hendaknya beradab melalui perkataan dan seragamnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>192</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami, Op.cit.*, h. 73-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah,

1. Pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang undang nomor 23 tahun 2004 merupakan perbuatan KDRT. Pasal 9 ini membahas tentang kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, secara singkat dapat dipahami bahwa keluarga harus saling mendukung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi setiap anggota rumah tangga, seperti ayah harus mendukung anak dan istri misalnya. Dengan kata lain membatasi dan atau melarang yang dalam lingkup rumah tangga bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah dianggap sebagai penelantaran dalam rumah tangga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, menelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. *Kedua*, pembatasan bekerja oleh suami terhadap istrinya bukanlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku KDRT jika suami memberikan nafkah yang cukup kepada istri. *Ketiga*, istri boleh bekerja dengan syarat: suami setuju, pekerjaan yang digeluti adalah pekerjaan yang sesuai dengan aturan Islam dan halal, terhindar dari *fitnah* dan *khalwat*. *Keempat*, suami tidak boleh membatasi dan melarang istri bekerja bila telah ada perjanjian sebelum akad nikah berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama kontemporer dengan syarat pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sesuai dengan *syari'at* dan halal.

**B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian ini sebagai berikut,

1. Kepada setiap suami dan istri supaya mengedepankan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan dalam rumah tangga apalagi yang berhubungan dengan istri bekerja di luar rumah.
2. Pemerintah perlu membuat penjelasan lengkap tentang maksud pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 agar tidak multi tafsir.
3. Pemerintah dan DPR sudah saatnya merevisi undang-undang ini karena ruhnya bertentangan dengan kebebasan dalam melaksanakan kepercayaan.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghoffar, Muhammad, *Menyikapi Tingkah laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2004.
- Abdurrahman bin Shahih bin Ali Bassam, Abdullah bin, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Jeddah: Maktabah As-Sawadi Lit- Tauzi', 1992.
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang:Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughal Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, Qahirah: Darul Hadits, 2003.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar, *Sunan Kubra*, Beirut:Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet-3, Jilid 7, 1424 H.
- Albar, Muhammad, *Perempuan Karir Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam, Cet. II, 2000.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut:Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Juz V, 1987.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir. Tt.*
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hafidz bin Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, Semarang : Toha Putra, 2003.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, 2004.
- Al-Mashri, Mahmud, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rawi*, al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, Jilid 4, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Tawil Ayi al-Qur'an*, Beirut: Daar al Fikr, Jilid 3, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 9, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie el-Kattani, Jakarta:Gema Insani, Jilid 9, 2007
- Amin, Qasim, *al-Mar'ah al-Jadidah*, Mesir: Mathba'ah al Sya'b, 1900.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bin Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Ch, Mufidah, *Paradigma Gender*, cet II, Malang:IB Bayu Media, 2004
- Faqih, Mansour, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan* Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2006.
- Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ambon: STAIN Ambon Press, 2007.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 4, t.t.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut:Dar Al Fikr, t.th, Juz 1.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 2001.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mukhttar, Naqiyah, *Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung : Mizan, Cet. I, 1997.
- Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan Bandung: Mizan, 2005.
- Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia & Tazzata, 2004.
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, cet. Ke-1, 2012.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1994.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Kairo: t.p, Jilid 4, 1973.
- Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Fokus Media, 2004.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sayyid Sabiq Jilid II*, alih bahasa Asep Sobari dkk, Jakarta Timur : Al 'Itishom, 2008.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2008.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet, I, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2001.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-KAHFI, 2008



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta:LKIS, 1987.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

LBH APIK Jakarta, *"Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"* (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

LBH APIK Jakarta, *"Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan,* "http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.

<http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html>, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rumah%20Tangga>, terakhir diakses 11 Oktober 2019.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, Terakhir diakses 21 oktober 2019





UIN SUSKA RIAU



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Ahmad Rifai Ritonga

Nomor ID : 21790215639

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 09 September 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

54 : الاستماع  
56 : القواعد  
58 : القراءة  
560 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Tests Certificate Provided by:

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

It is a document that contains the results of the Arabic Proficiency Test (APT) conducted by the Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

It is a document that contains the results of the Arabic Proficiency Test (APT) conducted by the Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The Head of Language Development Center

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Mahyudin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحووية الإسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ahmad Rifai Ritonga

ID Number : 21790215639

Date of Birth : September 09, 1994

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50

Structure & Written Expressions : 52

Reading Comprehension : 52

Overall Score : 513

Expire Date : February 19, 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

English Proficiency Test Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information presented in this score report are approved

by the Head of Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

for the purpose of English Proficiency Test

for the purpose of English Proficiency Test

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



The Head of Language Development Center  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ahyudin Syukri, M. Ag

IP: 192.168.1.100



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.		Konsultasi: Penulisan Tesis	<i>Dr</i>	
2.		Perbaikan BAB I - III	<i>Dr</i>	
3.		Perbaikan Bab IV - V	<i>Dr</i>	
4.		Konsultasi & Perbaikan	<i>Dr</i>	
5.		Perbaikan finishing	<i>Dr</i>	
6.				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	20/02/24	Revisi / Bab I & II	<i>Dr</i>	
2.	27/02/24	Konsultasi	<i>Dr</i>	
3.				
4.				
5.				
6.		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: ANNA RIZKI RITONGA  
 : 21390215639  
 : Hukum Keluarga PPS S2  
 : Hukum Keluarga  
 : HK

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	02/07/2015	Hukum dalam Masyarakat Melaju		Julianti
2		Analisa peran adat adat		
3		dalam pernikahan di Desa		
4		muara koto Kecamatan Rambak		
5		Hilir Kabupaten Rokan Hulu		
6		menurut perspektif Hukum Islam		
7	09/07/2015	Penggunaan Huk Cerai oleh Istri		
8		Harapidana 3 tahun di Lapas		
9		Kelas 25 pasir pengaraian		
10		menurut Hukum Islam		
11	09/07/2015	Hak Membatas. Bekerja bagi		Annam Kifur
12		pasangan rumah tangga Jabar		
13		UIN no 25 thn. 2004 thn		
14	06/07/2015	PKORT ditinjau menurut Hk dan		
15		Kilai Al Quran th Pertanian		
		Alaori (Tafsir maulhui)		

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Halaman ini adalah bagian dari buku yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau. Buku ini adalah milik UIN Suska Riau dan tidak boleh dipinjamkan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NAMA**  
**NIM**  
**PROGRAM**  
**PRODI**  
**KONSENTRASI**

AHMAD RIFA RIZQI  
21790215639  
Pasca Sarjana  
Hukum Keluarga  
Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



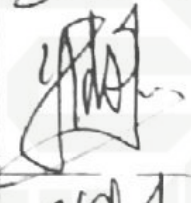
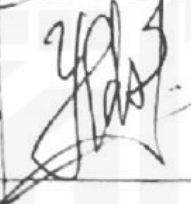
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	28/03-2019 Maret	Program KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten INHU		Amrizal
	28/03-2019	Kontribusi Kecerdasan Spritual & Relegivitar terhadap dampak Psikologis Istri yg melawakan Cerai gugat di PA Kengat		Syafriyaldi
	28/03-2019	Factor <sup>xx</sup> Cerai gugat Istri terhadap suami di PA Kengat		Bendrawadi
	28/03-2019	Efektifitas Kursus Catin Dalam Meningkatkan Kesadaran & Pengetahuan tentang Pernikahan		Rahmad

Pekanbaru, 20 maret 2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA

NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

Ahmad Rifai Ritonga  
21790215639  
Pasca Sarjana S2  
Hukum Keluarga  
HK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. mengutip tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	06/11/2018	Kewenangan Wali Dalam Menentukan Pernikahan Janda di Bawah Umur Menurut Imam Syafi'i		R. Arifin
	06/11/2018	Saksi Adil Dalam pernikahan Menurut Imam Syafi'i ditinjau dari Ma'asid Syariat		M. Kaya Mubsin
	06/11/2018	Kufur Zuhud Dalam Pandangan Tafsir (Felaah Kufur, zuhud) Dr. Wahbah Az Zuhaili)		Hermansyah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar





KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA

NIM

PROGRAM

BODI

KONSENTRASI

: Ahmad Rifai Ritonga  
: 21990215029  
: S2  
: Hukum Keluarga  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	06/09/2018 Rabu	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Pasitana pada Masyarakat Pangkajene Kepulauan		Pidwan
2	06/09/2018 Rabu	Wali Mustik Melakukan perkawinan tanpa izin dari anak perempuan analisis pada mazhab Syafii & Lil Hami		M. Khairuddin
3	06/09/2018 Rabu	Larangan Resepsi perkawinan dua kali dalam setahun dengan satu keluarga menurut perkawinan suku Bugis		Sudirman
4	06/09/2018 Rabu	Sigkat Akad Nikah perspektif Imam Syafii dan Relevansinya Bagi Kemastahatan		Ali Mustaf

Pekanbaru, 6-9-2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB: Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA

: AHMAD RIYAI PITONGA

NIM

: 21790215639

PROGRAM

: PASCASARJANA

PRODI

: HUKUM KELUARGA

KONSENTRASI

: HUKUM KELUARGA

NO

TGL/HARI

JUDUL TESIS/DISERTASI

PARAF  
SEKRETARIS

KETERANGAN

TINJAUAN MAQSID SYARIAH POLIGAMI PADA  
UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1

AFERIADI

PERLINDUNGAN ANAK ADS PORNOGRAFI  
DALAM UU NO. 44 TAHUN 2008

SHOLIKUL JADID

PANDANGAN PENGHULU DALAM NIKAH  
MUHSYAR

ARIFIN

Pekanbaru, 29 MARET 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

5. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA

NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Ryai Ritonga  
21990215639  
Pasca Sarjana  
Hukum Keluarga  
HK

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	01 - 2019	Gowam & Nuzul serta implikasinya terhadap KPR di INHU		100%
2	01 - 2019	Hukum pernikahan lakrca Carit Keras Analisis pendapat Imam Tatalin bin Anas	zh Dr. Muen	Rdsi R.
3	01 - 2019	Implementasi USG terhadap masa lddat		R. Akhri
4	01 - 2019	Implikasi Al Qur'an terhadap kaum muslimin pada masa kisatoh (Studi Ayat - Al Qur'an ffg Umar)		Safi'i

Pekanbaru, \_\_\_\_\_ 2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

ALHAMD RIFA I RITONGA

21230215050

HK PPS S2

HK

HK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dianggap sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	27/02/19	lhdad wanita karier yang ditinggal mati oleh suami dalam hukum Islam dan maqashid syariah.		Edi Irawan Syah Aruan
		Pran mama dalam memelihara warisan pusaka firqi dikanaggarraan magok bab. agama menurut hukum Islam.		Risa Haryati
		penetapan ahlak dari hub. Biologis diwaris oleh perpesta pira Islam.		Oscar Maulana

Pekanbaru, \_\_\_\_\_ 2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ANMAN RIFAH RITONGO  
NIM : 21730215635  
PROGRAM : PASCASARJANA  
PRODI : HUKUM KELUARGA  
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27/07/2015	Perceraian di PA (studi kasus putusan Istri yang melakukan cerai gugat di PA Pekanbaru thn 2017		19-yesri mar.
2	27/07/2015	Wali Adhal menurut pasal 23 dalam Ktt		Utamin
3	27/07/2015	Praktek Kafah dalam perkawinan masyarakat melayu Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti		Kamaruddin
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Ahmad Rifai Ritonga

Tempat Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 09-09-1994

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Domisili : Jl. Baru, Perumahan Villa Bunga Arengka Blok E2

No HP : 085271611831

Nama Orang Tua : Marahalim Ritonga  
Samsinar Nasution

### **Riwayat Pendidikan**

- SDN 117470 Rantau Prapat 2000- 2006
- MTs Pondok Pesantren Darussalam Parmeraen 2006-2009
- MAS Pondok Pesantren Darussalam Parmeraen 2009-2012
- Uin Suska Riau 2012-2016

### **Pengalaman Organisasi**

- Ketua Osis Pondok Pesantren Darussalam Parmeraen
- Anggota BEM Fakultas Syariah dan Hukum
- Kordinator Intelektual Himpunana Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga
- Magang PA Pekanbaru
- Para Legal LBH PA Bangkinang
- Ketua IKADLN Parmeraen Provinsi Riau

### **Pengalaman Pekerjaan**

- Guru MDTA Al-Hijrah
- Guru SDIT Sakinah
- Guru Yayasan Al-Haramain
- Karyawan LAZ Swadaya Ummah
- Founder Rumah Qur'an At Taysir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.